

## **Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi-Provinsi di Sumatera**

**Angga Syahputra\* ; Erfit ; Nurhayani**

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fak Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

*\*E-mail korespondensi: anggasyahputra0324@gmail.com*

### **Abstract**

*This study aims to: 1) To analyze the development of the open unemployment rate, economic growth, government spending, minimum wages, and the level of education of the provinces in Sumatra. 2) To find out and analyze what factors influence the income of street vendors on Jalan Basuki Rahmat to General H. Agus Salim by using panel data regression analysis tools. The development of the level of open unemployment, economic growth, and government spending in the provinces on the island of Sumatra during 2015-2017 fluctuated, however, the minimum wage and education level tended to increase. The regression results show that part, the variables of economic growth and the level of education have a significant effect on the level of open unemployment, while the variables of government spending and the minimum wage have no significant effect on the level of open unemployment in the provinces of Sumatra Island.*

---

**Keywords:** *Open unemployment rate, Economic growth, Government expenditures, Minimum wages, Education level*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menganalisis perkembangan tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, upah minimum dan tingkat pendidikan Provinsi di Sumatera. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima di Jalan Basuki Rahmat Sampai Jenderal H. Agus Salim dengan menggunakan alat analisis regresi data panel. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi, namun upah minimum dan tingkat pendidikan cenderung mengalami peningkatan. Hasil regresi menunjukkan secara parsial, variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sementara variabel pengeluaran pemerintah dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.

---

**Kata kunci:** Tingkat pengangguran terbuka, Pertumbuhan ekonomi, Pengeluaran pemerintah, Upah minimum, Tingkat pendidikan.

### **PENDAHULUAN**

Pengangguran yang tinggi termasuk kedalam masalah ekonomi dan masalah sosial. Pengangguran merupakan masalah ekonomi karena ketika angka pengangguran meningkat, sebagai dampaknya suatu negara membuang barang dan jasa yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pengangguran. Pengangguran juga merupakan masalah sosial yang besar karena mengakibatkan penderitaan yang besar untuk pekerja

yang menganggur yang harus berjuang dengan pendapatan yang kurang. Biaya ekonomi dari pengangguran jelas besar, namun tidak ada jumlah mata uang yang dapat mengungkapkan secara tepat tentang korban psikologi dan manusia pada saat mereka menganggur (Samuelson, 2008).

Pengangguran terbuka biasanya terjadi pada generasi muda yang baru menyelesaikan pendidikan menengah dan tinggi. Ada kecenderungan mereka yang baru menyelesaikan pendidikan berusaha untuk mencari kerja sesuai dengan aspirasi mereka. Aspirasi mereka biasanya untuk bekerja di sektor modern atau dikantor. Untuk mendapatkan pekerjaan itu mereka bersedia menunggu beberapa lama. Tidak menutup kemungkinan mereka berusaha mencari pekerjaan di kota, provinsi atau di daerah yang kegiatan industrinya telah berkembang. Ini yang menyebabkan angka pengangguran terbuka cenderung cukup tinggi di kota atau daerah tersebut. Sebaliknya angka pengangguran terbuka rendah didaerah atau di provinsi yang kegiatan ekonominya masih tertumpu pada sektor tradisional, terlebih jika tingkat pendidikan didaerah itu masih rendah (Kuncoro, 2003; Junaidi & Zulfanetti, 2016).

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw, 2003).

Berdasarkan data dari *BPS (2018)* tingkat pengangguran tahun 2017 di pulau besar Indonesia, dapat dilihat dalam lingkup yang lebih kecil persentase tingkat pengangguran antarpulau tidak sama atau masih terdapat disparitas antarwilayah. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi di Pulau Jawa dengan tingkat pengangguran sebesar 5,92 persen, sementara tingkat pengangguran terendah tercatat pada Pulau Bali dan Nusa Tenggara dengan tingkat pengangguran hanya sebesar 3,03 persen. Sedangkan Pulau Sumatera tingkat penganggurannya sebesar 5,89 persen, tertinggi kedua setelah Pulau Jawa. Tingginya tingkat pengangguran di Pulau Sumatera menunjukkan kondisi makro yang buruk pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik persentase tingkat pengangguran terbuka provinsi di Sumatera tahun 2015-2017 terjadi perkembangan yang fluktuatif di setiap tahunnya. Tingkat pengangguran terbuka yang paling tertinggiterjadi di Provinsi Aceh yaitu pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,93 persen. Pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebesar 7,57 persen. Pada tahun 2017 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 6,57 persen dan rata-ratanya sebesar 8,03 persen. Sedangkan Provinsi yang pengangguran terbukanya terendah terjadi di Provinsi Jambi pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,34 persen. Pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar 4,00 persen. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 3,87 persen dan rata-rata selama tiga tahun sebesar 4,07.

Dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur untuk suatu keberhasilan pembangunan suatu negara atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2010). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Dengan pembangunan ekonomi yang meningkat akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang pesat dari berbagai sektor akan dapat menyelesaikan masalah pengangguran. Menurut Jhingan (2012) faktor-faktor ekonomi meliputi faktor tanah dan kekayaan alam, akumulasi modal, organisasi, teknologi dan pembagian kerja dan skla produksi. Tanah dan kekayaan

alam lainnya adalah sumber daya alam yang merupakan faktor utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro (2004), pengeluaran publik yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditunjukkan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu dapat disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu Negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara (Sukirno, 2006).

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera selama tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi yang paling tertinggi Sumatera Barat pada tahun 2015 sebesar 5,52 persen dan pada tahun 2016 sebesar 5,26 persen. Dan tahun 2017 sebesar 5,39 persen, sementara rata-rata pertumbuhan ekonominya selama tiga tahun terakhir sebesar 5,39 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang paling terendah adalah Provinsi Riau Pada tahun 2015 sebesar 0,22 persen dan pada tahun 2016 sebesar 2,23 persen. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi sebesar 2,91 persen. sementara rata-rata pertumbuhan ekonominya selama tiga tahun terakhir sebesar 1,79 persen.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik terlihat bahwa pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera selama tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Pengeluaran pemerintah yang paling tertinggi terjadi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar 17.428 milyar rupiah. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar 19.715 milyar rupiah dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 21.298 milyar rupiah sementara rata-rata selama tiga tahun terakhir sebesar 19.480 milyar rupiah. Sedangkan pengeluaran pemerintah yang paling terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pada tahun 2015 sebesar 1.869 milyar rupiah. Pada tahun 2016 meningkat kembali menjadi sebesar 2.439 milyar rupiah dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 3.146 milyar rupiah sementara rata-rata selama tiga tahun terakhir sebesar 2.485 milyar rupiah.

Upah minimum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit kerja berupa jumlah uang yang dibayarkan. (Kaufman dan Hotchkiss, 1999). Berdasarkan Badan Pusat Statistik terlihat bahwa upah minimum di Provinsi Sumatera selama tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Upah minimum yang paling tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1.954 ribu rupiah. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar 2.178 ribu rupiah dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 2.538 ribu rupiah sementara rata-rata selama tiga tahun terakhir sebesar 2.223 ribu rupiah. Sedangkan upah minimum yang paling rendah terjadi di Provinsi Bengkulu yaitu pada tahun 2015 sebesar 1.500 ribu rupiah. Pada tahun 2016 meningkat kembali menjadi sebesar 1.605 ribu rupiah dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1.737 ribu rupiah sementara rata-rata selama tiga tahun terakhir sebesar 1.641 ribu rupiah.

Pendidikan diposisikan sebagai sarana untuk peningkatan kesejahteraan melalui berdasarkan Badan Pusat Statistik terlihat bahwa tingkat pendidikan di Provinsi Sumatera selama tahun 2015-2017 mengalami peningkatan. Tingkat pendidikan yang paling tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar 9,64. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi sebesar 9,65 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 9,67 sementara rata-rata selama tiga tahun terakhir sebesar 9,65. Sedangkan tingkat

pendidikan yang paling rendah terjadi di Provinsi Bangka Belitung yaitu pada tahun 2015 sebesar 7,35. Pada tahun 2016 meningkat kembali menjadi sebesar 7,46 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,62 sementara rata-rata selama tiga tahun terakhir sebesar 7,48.

## METODE

Data penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data panel, yaitu data terdiri dari dua bagian yaitu: time series dan *cross section*, data *time series* adalah data tahunan yang dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dan *cross section* adalah sebanyak 10 Provinsi yang ada di Provinsi Sumatera. yang diperoleh dari instansi-instansi pemerintah dan dari situs-situs internet yang telah diolah lebih lanjut. Adapun jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1).Data tingkat pengangguran terbuka provinsi di Sumatera, 2).Data pertumbuhan ekonomi provinsi di Sumatera, 3).Data pengeluaran pemerintah provinsi di Sumatera, 4).Upah minimum Provinsi di Sumatera dan 5).Tingkat pendidikan.

Data ini diperoleh dari sumber resmi, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Surat Kabar, Tulisan-tulisan yang dianggap relevan dari beberapa media massa yang mendukung dalam penulisan ini.

Dalam menjawab permasalahan pertama maka digunakan analisis deskriptif digunakan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisa perkembangan variabel yang digunakan dalam penelitian. Untuk menghitung besarnya perkembangan diketahui dengan menggunakan rumus berikut :

$$Gx = \frac{Gx_t - Gx_{t-1}}{Gx_{t-1}}$$

Dimana :

- Gx : Perkembangan variabel per tahun  
 Gx<sub>1</sub> : Perkembangan tahun yang bersangkutan  
 Gx<sub>t-1</sub> : Perkembangan tahun sebelumnya

Untuk menjawab tujuan kedua metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kuantitatif dan menggabungkan observasi data deret waktu dan data *cross section* atau bersifat data panel. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program software Microsoft Excel dan E-views 8.0. Dalam penelitian ini, data yang diuji bersifat data panel (*time series*) dan (*cross section*), Baltagi (2005) mengemukakan bahwa terdapat keuntungan menggunakan data panel dibandingkan dengan data deret waktu atau *cross section*. Model regresi data panel sebagai berikut (Gujarati, 2003) :

$$TPT_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 PP_{it} + \beta_3 UM_{it} + \beta_4 TP_{it} + e$$

Dimana :

- TPT (Y) = Tingkat pengangguran terbuka Provinsi di Sumatera (Persen)  
 i = Jumlah observasi (Provinsi) = 10  
 t = Tahun data observasi (tahun/deret waktu) = 3 tahun  
 α = Kostanta  
 β<sub>i</sub> = Koefisien (banyaknya peubah bebas) = 1,2,3  
 PE = Pertumbuhan ekonomi Provinsi di Sumatera  
 PP = Pengeluaran pemerintah Provinsi di Sumatera  
 UM = Upah minimum  
 TP = Tingkat pendidikan  
 e = Komponen *error term*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis tingkat pengangguran

Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Berdasarkan data dari BPS (2019) mengenai perkembangan tingkat pengangguran di Provinsi se-Sumatera selama tahun 2015 sampai tahun 2017 dimana setiap tahunnya tingkat pengangguran terus mengalami fluktuatif. Untuk rata-rata tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada Provinsi Aceh dengan rata-rata tingkat pengangguran selama tiga tahun terakhir sebesar 8,64 persen, artinya seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di Provinsi Aceh tergolong dalam pengangguran dengan tingkat pengangguran sebesar 8,03 persen. Kemudian untuk rata-rata tingkat pengangguran tertinggi kedua dan ketiga terjadi pada Provinsi Riau dan Kepulauan Riau dengan tingkat pengangguran selama tigatahun terakhir sebesar 7,13 persen dan 7,07 persen.

Sedangkan rata-rata tingkat pengangguran terendah terjadi pada Provinsi Jambi dengan tingkat pengangguran selama tiga tahun terakhir sebesar 4,07 persen, artinya seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di Provinsi Jambi tergolong dalam pengangguran dengan tingkat pengangguran hanya sebesar 4,07 persen. Kemudian untuk rata-rata tingkat pengangguran terendah kedua terjadi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat pengangguran selama tiga tahun terakhir sebesar 4,23 persen, artinya seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergolong dalam pengangguran dengan tingkat pengangguran hanya sebesar 4,23 persen. Dan yang terakhir untuk rata-rata tingkat pengangguran terendah ketiga terjadi pada Provinsi Lampung dengan tingkat pengangguran selama tiga tahun terakhir sebesar 4,67 persen, artinya seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergolong dalam pengangguran dengan tingkat pengangguran hanya sebesar 4,67 persen.

Berdasarkan rata-rata tingkat pengangguran Provinsi se-Sumatera dapat kita simpulkan masih tingginya tingkat pengangguran pada provinsi yang ada di Sumatera. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata tingkat pengangguran yang digunakan dengan menggunakan proporsi penduduk berumur 15 tahun keatas yang belum bekerja terhadap total angkatan kerja dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dimana Provinsi di Sumatera yang paling rendah tingkat penganggurannya adalah Provinsi Jambi yaitu 4,07 persen.

Berdasarkan data dari BPS (2019) perkembangan tingkat pengangguran di Provinsi se-Sumatera selama tahun 2015 sampai tahun 2017 dimana seluruh provinsi di Sumatera perkembangan tingkat penganggurannya mengalami penurunan yang berfluktuatif. Untuk rata-rata penurunan tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada Provinsi Aceh yaitu sebesar -18,50 persen dan penurunan tingkat pengangguran. Sementara untuk rata-rata peningkatan tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 81,20 persen. Seharusnya pemerintah provinsi-provinsi di Sumatera harus bisa menekan tingkat pengangguran dengan memperluas lapangan pekerjaan di masing-masing daerahnya sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di daerahnya masing-masing.

### Analisis pertumbuhan ekonomi

Salah satu cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat perkembangan PDRB-nya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan nilai output perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi disuatu wilayah tertentu (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Perhitungan PDRB selalu disajikan atas harga berlaku dan harga konstan.

Perkembangan ekonomi suatu wilayah mempunyai keterkaitan dengan wilayah lain, hal ini disebabkan sudah tidak adanya lagi batasan kegiatan ekonomi antar wilayah. Pada periode 2015-2017, pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi se Sumatera memang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Namun secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Sumatera Barat yang mencapai 5,39 persen per tahun. Provinsi Sumatera Barat mampu mengejar ketertinggalan pembangunan ekonomi dari beberapa provinsi maju di Sumatera selama tahun 2015 sampai tahun 2017. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di provinsi Riau yaitu mengalami perlambatan sebesar 1,79 persen. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau disebabkan oleh anjloknya produksi dari sektor pertanian serta pertambangan dan penggalian.

### **Analisis pengeluaran pemerintah**

Pengeluaran pemerintah adalah belanja sektor pemerintah termasuk pembelian barang dan jasa dan pembayaran subsidi. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi penting pemerintahan. Berdasarkan data dari BPS (2019) dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami perkembangan yang cenderung meningkat. Perkembangan tertinggi tercatat pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rata-rata perkembangan sebesar 29,74 persen. Perkembangan tertinggi tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Bangka Belitung banyak kegiatan-kegiatan dan program-program-program pembangunan yang membutuhkan anggaran yang besar setiap tahunnya. Sedangkan perkembangan terendah tercatat pada Provinsi Jambi dengan rata-rata perkembangan pengeluaran pemerintah yaitu sebesar 8,85 persen. Rendahnya perkembangan pengeluaran pemerintah di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi tidak banyak memiliki program pembangunan atau kegiatan yang besar sehingga pengeluaran pemerintah Provinsi Jambi tidak begitu besar peningkatan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya.

### **Analisis upah minimum**

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan data dari BPS (2019) mengenai upah minimum di Provinsi se-Sumatera selama tahun 2013 sampai tahun 2017 dimana setiap tahunnya upah minimum terus mengalami peningkatan. Untuk rata-rata upah minimum tertinggi terjadi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rata-rata upah minimum selama tiga tahun terakhir sebesar Rp.2.325 ribu. Kemudian untuk rata-rata upah minimum tertinggi kedua terjadi pada Provinsi Sumatera Selatan dengan upah minimum selama tiga tahun terakhir sebesar Rp.2.189 ribu. Sementara untuk rata-rata upah minimum tertinggi ketiga terjadi pada Provinsi Aceh dengan upah minimum selama tiga tahun terakhir sebesar Rp.2.173 ribu.

Sedangkan rata-rata upah minimum terendah terjadi pada Provinsi Bengkulu dengan upah minimum selama tiga tahun terakhir sebesar Rp.1.614 ribu. Kemudian untuk rata-rata upah minimum terendah kedua terjadi pada Provinsi Lampung dengan upah minimum selama tiga tahun terakhir sebesar Rp1.751 ribu dan yang terakhir untuk rata-rata upah minimum terendah ketiga terjadi pada Provinsi Sumatera Barat dengan upah minimum selama tiga tahun terakhir sebesar Rp.1.788 ribu.

Dapat kita lihat pada Tabel 5.4 perkembangan upah minimum di Provinsi se-Sumatera selama tahun 2015 sampai tahun 2017 dimana seluruh provinsi di Sumatera perkembangan upah minimumnya mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Untuk

rata-rata perkembangan upah minimum tertinggi terjadi pada Provinsi Aceh yaitu sebesar 14,76 persen dan perkembangan upah minimum tertinggi kedua terjadi pada Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 14 persen. Sementara untuk rata-rata perkembangan upah minimum terendah terjadi pada Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 7,61 persen.

### **Analisis tingkat pendidikan**

Analisis capaian pendidikan dapat dilihat dari Rata-rata lama Sekolah - RLS (Mean Years of Schooling -MYS). Untuk keterbandingan antar wilayah, analisis ketimpangan capaian pendidikan Berdasarkan data dari BPS (2019) mengenai tingkat pendidikan di Provinsi se-Sumatera selama tahun 2015 sampai tahun 2017 dimana setiap tahunnya tingkat pendidikan terus mengalami peningkatan. Untuk rata-rata tingkat pendidikan tertinggi terjadi pada Provinsi Kepulauan Riau dengan rata-rata tingkat pendidikan selama tiga tahun terakhir sebesar 9,65, artinya seluruh penduduk berusia 25 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Riau telah menjalani pendidikan selama 9,65 tahun (setara kelas 1 SMA). Kemudian untuk rata-rata tingkat pendidikan tertinggi kedua terjadi pada Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat pendidikan selama tiga tahun terakhir sebesar 9,03, artinya seluruh penduduk berusia 25 tahun ke atas di Provinsi Sumatera Utara telah menjalani pendidikan selama 9,03 tahun (setara kelas 3 SMP). Sementara untuk rata-rata tingkat pendidikan tertinggi ketiga terjadi pada Provinsi Aceh dengan tingkat pendidikan selama tiga tahun terakhir sebesar 8,78, artinya seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di Provinsi Aceh telah menjalani pendidikan selama 8,78 tahun (setara kelas 3 SMP).

Sedangkan rata-rata tingkat pendidikan terendah terjadi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tingkat pendidikan selama tiga tahun terakhir sebesar 7,48, artinya seluruh penduduk berusia 25 tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menjalani pendidikan selama 7,48 tahun (setara kelas 2 SMP). Kemudian untuk rata-rata tingkat pendidikan terendah kedua terjadi pada Provinsi Lampung dengan tingkat pendidikan selama tiga tahun terakhir sebesar 7,56, artinya seluruh penduduk berusia 25 tahun ke atas di Provinsi Lampung telah menjalani pendidikan selama 7,56 tahun (setara kelas 2 SMP), dan yang terakhir untuk rata-rata tingkat pendidikan terendah ketiga terjadi pada Provinsi Sumatera Selatan dengan tingkat pendidikan selama tiga tahun terakhir sebesar 7,75, artinya seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di Provinsi Sumatera Utara telah menjalani pendidikan selama 7,75 tahun (setara kelas 2 SMP).

Berdasarkan rata-rata tingkat pendidikan Provinsi se-Sumatera dapat kita simpulkan masih rendahnya tingkat pendidikan pada provinsi yang ada di Sumatera. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata tingkat pendidikan yang digunakan dengan menggunakan angka rata-rata lama sekolah dari tahun 2015 sampai tahun 2017 hanya Provinsi Kepulauan Riau yang rata-rata lama sekolahnya sampai 9,65 tahun namun tidak sampai 12 tahun.

### **Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka provinsi di Sumatera**

Berdasarkan output uji chow menunjukkan bahwa baik F test maupun Chi-Square signifikan (Prob. 0,6412 dan 0,6412 lebih besar dibandingkan alfa 0,05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model PLS lebih baik dibandingkan model FEM. Sehingga pengujian berikutnya yaitu dengan membandingkan metode FEM atau REM dengan melakukan uji *hausman*. *Hausman Test* (Uji Hausman) dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara FEM dan REM.

Berdasarkan output uji Hausman menunjukkan bahwa nilai statistik Chi-Square memiliki Prob lebih kecil dibandingkan alfa 0,05 persen ( $0,9220 > 0,05$ ), sehingga

hipotesis  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model REM lebih baik dibandingkan FEM. Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk membandingkan/ memilih model mana yang terbaik antara PLS dan REM.

Berdasarkan hasil uji Lagrange Multiplier bahwa nilai Prob. Breusch-Pagan (BP) sebesar 0,1789 (Pada kolom kedua yaitu "Both"). Sesuai hipotesis, jika Prob BP (0,1789) > 0,05 maka  $H_0$  diterima, dengan kata lain model yang cocok adalah PLS.

### Hasil pengujian estimasi model common-constans (PLS)

Hasil estimasi persamaan data panel tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbukayang dijelaskan pada table berikut:

**Tabel 1.** Hasil estimasi common-constans (PLS)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PE?	-0.571371	0.144815	-3.945516	0.0005
PP?	0.003291	0.004368	0.753462	0.4579
UM?	-0.001345	0.000737	-1.823931	0.0797
TP?	1.276020	0.208632	6.116132	0.0000
R-squared	0.550769	Mean dependent var		5.796667
Adjusted R-squared	0.498934	S.D. dependent var		1.762342
S.E. of regression	1.247492	Akaike info criterion		3.403713
Sum squared resid	40.46212	Schwarz criterion		3.590539
Log likelihood	-47.05569	Hannan-Quinn criter.		3.463480
Durbin-Watson stat	2.335382			

Sumber : Data diolah, 2019

### Estimasi model PLS

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 5.9 tersebut dapat diketahui penjelasan masing-masing variabel dalam penelitian yaitu pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbukadapat dijelaskan persamaan model sebagai berikut:

$$TPT_{it} = \beta_0 - 0,5713PE + 0,0032PP - 0,0013UM + 1,2760TP$$

$$\text{Prob} = (0,0005) (0,4579) (0,0797) (0,0000)$$

Berdasarkan Persamaan Model dapat dijelaskan hasil estimasi terhadap *PL* Sadalah sebagai dimana: 1. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -0,5713. Hal ini diartikan jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen maka tingkat pengangguran terbuka provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar -0,5713 persen, 2. Nilai koefisien pengeluaran pemerintah sebesar -0,0032. Hal ini diartikan jika pengeluaran pemerintah meningkat 100 milyar rupiah maka tingkat pengangguran provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 0,0032 persen, 3. Nilai koefisien upah minimum sebesar -0,0013. Hal ini diartikan jika upah minimum meningkat satu ribu maka tingkat pengangguran provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar -0,0013 persen, 4. Nilai koefisien tingkat pendidikan sebesar 1,2760. Hal ini diartikan jika tingkat pendidikan meningkat satu tahun maka tingkat pengangguran provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 1,2760 persen.

### Uji hipotesis

#### Uji F statistik

Dapat dilihat pada Tabel 5.9 diatas diketahui bahwa pada model PLS tidak terdapat hasil Prob (F-Statistic) yang muncul. Sehingga tidak ada penjelasan pengaruh secara simultan pada penelitian ini.

#### Uji R<sup>2</sup>

Dapat dilihat pada Tabel 5.9 bahwa nilai R-Squared adalah sebesar 0,5507 artinya bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka dapat dijelaskan oleh variabel bebas pada tingkat korelasinya sebesar 55,07 persen.

#### Uji t statistik

Untuk menguji signifikansi pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka pada provinsi-provinsi di Sumatera secara parsial maka digunakan uji t statistik. Uji t Statistik berguna untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel Independen terhadap variabel dependen secara parsial. Tingkat kepercayaan 95 persen dengan uji dua arah dan  $df = 25$  ( $n=30-5$ ) nilai t Tabel yang diperoleh adalah 1,7081 digunakan alat uji t Statistik yang dapat di lihat di Tabel berikut ini:

**Tabel 2.** Nilai t statistik pada metode REM

Variabel	t Hitung	t Tabel	Prob.	Keterangan
PE	-3,9455	1,7081	0,0005	Signifikan
PP	0,7534	1,7081	0,4579	Tidak Signifikan
UM	-1,8239	1,7081	0,0797	Tidak Signifikan
TP	6,1161	1,7081	0,0000	Signifikan

Sumber : Data diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 2 dapat diterangkan hasil uji t statistik sebagai berikut: 1. Diketahui bahwa nilai *Prob* dari pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0005 karena  $Prob > 0,05$  persen, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera 2. Diketahui bahwa *Prob* dari pengeluaran pemerintah sebesar 0,4579 karena  $Prob > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka pada provinsi-provinsi di Sumatera 3. Diketahui bahwa *Prob* dari upah minimum sebesar 0,0797 karena  $Prob > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Ini menunjukkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka pada provinsi-provinsi di Sumatera, 4. Diketahui bahwa nilai *Prob* dari tingkat pendidikan sebesar 0,0000 karena  $Prob < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ . Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.

#### Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka

Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi adalah negatif yaitu sebesar -0,5713. Hal ini diartikan jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen maka tingkat pengangguran terbuka provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar -0,5713 persen. Berdasarkan hasil parsial bahwa nilai *Prob* dari pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0005

karena  $Prob > 0,05$  persen, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Samuelson (2004) yang mengatakan Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat diukur melalui peningkatan maupun penurunan GDP yang dihasilkan suatu negara, karena GDP merupakan indikator yang berhubungan dengan pengangguran. Secara teori setiap peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di provinsi-provinsi Sumatera disebabkan pertumbuhan ekonomi telah menyerap tenaga kerja seiring dengan meningkatnya setiap sektor PDRB.

### **Pengaruh pengeluaran pemerintah ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka**

Nilai koefisien pengeluaran pemerintah adalah negatif yaitu sebesar  $-0,0032$ . Hal ini diartikan jika pengeluaran pemerintah meningkat 100 milyar rupiah maka tingkat pengangguran provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar  $0,0032$  persen. Berdasarkan hasil parsial bahwa nilai  $Prob$  dari pengeluaran pemerintah sebesar  $0,4579$  karena  $Prob > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka pada provinsi-provinsi di Sumatera. Hasil ini tidak sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh Menurut teori ekonomi Keynesian dalam Sadono Sukirno (2010), menjelaskan variabel pemerintah dalam hal ini adalah anggaran dijadikan salah satu faktor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Tidak berpengaruhnya pengeluaran pemerintah terhadap tingkat pengangguran terbuka dikarenakan pengeluaran pemerintah provinsi-provinsi di Sumatera tidak mengalokasikan anggaran-anggaran pengeluaran pemerintah ke kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja, namun banyak pengalokasian terhadap kegiatan internal dan belanja pegawai.

### **Pengaruh upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka**

Nilai koefisien upah minimum adalah negatif yaitu sebesar  $-0,0013$ . Hal ini diartikan jika upah minimum meningkat satu ribu maka tingkat pengangguran provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar  $-0,0013$  persen. Berdasarkan hasil parsial bahwa nilai  $Prob$  dari upah minimum sebesar  $0,0797$  karena  $Prob > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Ini menunjukkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka pada provinsi-provinsi di Sumatera. Hasil ini tidak sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh Mankim (2012) yang menyatakan penyebab terjadinya pengangguran adalah akibat adanya kekakuan upah (*wage rigidity*) yaitu ketidakmampuan upah dalam melakukan penyesuaian sampai di titik ekuilibrium, di mana penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. Tidak berpengaruhnya upah minimum terhadap tingkat pengangguran dikarenakan jika dilihat secara keseluruhan upah minimum provinsi di Sumatera terus mengalami peningkatan, peningkatan tersebut terus terjadi setiap tahunnya. Meningkatnya upah minimum tidak lantas meningkatkan tingkat pengangguran, dikarenakan kebutuhan tenaga kerja yang terus bertambah seiring bertambahnya produksi, hal tersebut membuat pelaku usaha memikirkan cara lain untuk menutupi cost yang bertambah diakibatkan upah yang meningkat setiap

tahunnya secara rutin. Hal tersebut menjadi alasan dibalik tidak berpengaruhnya upah meimum terhadap tingkat pengangguran.

### **Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka**

Nilai koefisien tingkat pendidikan adalah positif yaitu sebesar 1,2760. Hal ini diartikan jika tingkat pendidikan meningkat satu tahun maka tingkat pengangguran provinsi-provinsi di Pulau Sumatera sebesar 1,2760 persen. Berdasarkan hasil parsial bahwa nilai *Prob* dari tingkat pendidikan sebesar 0,0000 karena  $Prob < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ . Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera, akan tetapi walaupun dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, namun pengaruhnya adalah positif. Hasil ini tidak sependapat dengan teori yang dikemukakan oleh Sumarsono (2009) yang menyatakan bahwa semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka akan meningkatkan kemampuan kerja sehingga akan mendapatkan kualitas SDM yang baik dan nantinya akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Hasil tersebut terjadi disebabkan jika dilihat secara keseluruhan data, bahwa rata-rata penduduk tamat sekolah paling tinggi adalah kelas 1 SMA dan selebihnya hanya tamat SMP. Rendahnya tingkat pendidikan tentunya akan meningkatkan tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan seseorang susah untuk mendapatkan pekerjaan, hal tersebut terjadi pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi, namun upah minimum dan tingkat pendidikan cenderung mengalami peningkatan. Hasil regresi menunjukkan secara parsial, variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka, sementara variabel pengeluaran pemerintah dan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.

### **Saran**

Tingkat pengangguran pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera selama tahun 2015-2017 masih mengalami fluktuasi dan harus dapat dikurangi setiap tahunnya, yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan pengurangan tingkat pengangguran dengan dikaitkan dengan variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, upah minimum dan tingkat pendidikan. Pertumbuhan ekonomi seharusnya dapat ditingkatkan setiap tahunnya begitu juga dengan pengeluaran pemerintah. Tingkat pendidikan dan upah minimum yang cenderung meningkat setiap tahunnya harus mempunyai dampak yang dapat mengurangi tingkat pengangguran pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera. Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Pemerintah harus mengupayakan sektor basis dari peningkatan pertumbuhan ekonomi agar sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Begitu juga dengan sektor lain dalam PDRB harusnya dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya seiring dengan peningkatan produksi. Selain itu pemerintah juga harus meningkatkan tingkat pendidikan pada indikator rata-

rata lama sekolah dengan cara meningkatkan anggaran pemerintah untuk beasiswa bagi siswa yang tidak mampu, menetapkan standar minimal sekolah minimal sekolah 12 tahun dan membuat peraturan tentang kewajiban kepada perusahaan-perusahaan besar agar memberikan bantuan berupa beasiswa hingga jenjang perkuliahan bagi siswa yang tidak mampu. Kebijakan tersebut untuk mengurangi tingkat pengangguran pada provinsi-provinsi di Pulau Sumatera.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baltagi, Badi H. (2005). *Econometrics*. Springer-Verlag: Berlin
- IM Sholihah, S Syaparuddin, N Nurhayani. (2017). Analisis investasi sektor industri manufaktur, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12 (1), 11-24
- Jhingan M.L, (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Perss : Jakarta
- Junaidi, J. & Zulfanetti, Z. (2016). Analisis Kondisi dan Proyeksi Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3 (3), 141-150
- Kaufman dan Hotchkiss, (1999). *Ekonomi Pembangunan*. FE UGM : Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudjarad, (2003). *Ekonomi Pembangunan*. UPP AMP YKPN : Yogyakarta.
- Mankiw N G, (2003). *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga : Jakarta.
- Samuelson, A. Paul. (2008). *Mikro Ekonomi*. Erlangga : Jakarta
- Samuelson, Paul dan William D. Nordhaus, (2004). *Ilmu Makro ekonomi Makro*. Media Global Edukasi : Jakarta.
- Sukirno, Sadono.(2010). *Makroekonomi teori pengantar*. Edisi ketiga. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sukirno. (2006). *Pengantar teori ekonomi makro*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Todaro, Michael. (2004). *Pembangunan ekonomi*. Gramedia Pustaka : Jakarta
- Z Zamzami, D Hastuti. (2018). Determinan penerimaan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jambi, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 13 (1), 37-45